

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 586 TAHUN 2017

TENTANG

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengukur serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 perlu menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016.**

KESATU : Menetapkan Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 586 TAHUN 2017
Tanggal 16 Maret 2017

PERJANJIAN KINERJA

UNIT SATUAN KERJA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN : 2016

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah | 1 Predikat LKIP | BB |
| | | 2 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP |
| 2 | Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat | 1 Angka kematian ibu | 35 orang per 100.000 kelahiran hidup |
| | | 2 Angka kematian bayi | 7,20 bayi per 100.000 kelahiran hidup |
| | | 3 Angka harapan hidup | 76,70 tahun |
| 3 | Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat | 1 Angka rata-rata lama sekolah | 11,55 |
| 4 | Meningkatnya perlindungan sosial kepada korban bencana, dan jaminan sosial kepada PMKS non potensial dengan kriteria tertentu | 1 Respon time penanggulangan bencana | 3 jam |
| 5 | Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan | 1 Persentase sampah dalam kota yang dapat ditangani secara tepat waktu | 0,98 |

| NO | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 6 | Meningkatnya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja | 1 | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | 80% dari seluruh pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan |
| 7 | Meningkatnya Kurikulum Pelatihan Keterampilan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja | 1 | Persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan | 78% dari jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan |
| 8 | Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya | 1 | Panjang kali/sungai yang dinormalisasi | 9.615 m |
| | | 2 | Terlaksananya pengerukan sungai | 27.884 m |
| 9 | Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan (road ratio) melalui pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan jalan, pembangunan missing link, penyempurnaan simpang serta pembangunan simpang tidak sebidang | 1 | Luas Jalan yang terbangun | 119.870 m ² |
| | | 2 | Panjang pedestrian/trotoar yang terbangun/ditingkatkan | 8.000 m |
| 10 | Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang | 1 | Jumlah penumpang Busway per hari | 850.000 pnp/hari |
| 11 | Meningkatnya ketersediaan energi kebutuhan kota, termasuk energi yang terbarukan, secara efektif, efisien dan ekonomis serta berkesinambungan | 1 | Terkoordinasinya pembangunan SPBG/MRU | 4 SPBG/MRU |

| NO | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 12 | Meningkatnya Ruang Bagi Sektor Informal pada Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan Perumahan | 1 | Persentase peningkatan luas ruang PKL (m ²) di lokasi binaan dan lokasi sementara | 20% |
| 13 | Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan | 1 | Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direpson dari berbagai saluran media | 72% |
| 14 | Berkurangnya tingkat risiko/efek negatif akibat kebakaran | 1 | Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time) 15 menit | 81% |
| 15 | Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perizinan yang transparansi dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi | 1 | jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online | 10.237 wajib pajak |
| 16 | Meningkatnya Intensitas dan Inovasi Promosi Pariwisata | 1 | Jumlah kunjungan wisman | 2.800.000 orang |
| | | 2 | Jumlah kunjungan wisnus | 32.000.000 orang |
| | | 3 | Rata-rata lama tinggal | 2,35/2,11 hari |
| 17 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat | 1 | Persentase penyelesaian izin yang tepat waktu pada BPTSP | 99% |
| | | 2 | Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan BPTSP | 85% |
| 18 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi | 1 | Jumlah SDM Aparatur hasil rekrutmen berbasis CAT (Computer Assisted Test) | 2.000 CPNS |
| 19 | Meningkatnya investasi di DKI Jakarta | 1 | Jumlah proyek PMA | 1.100 proyek |
| | | 2 | Jumlah Proyek PMDN | 36 proyek |

| NO | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|
| 20 | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban kota | 1 | Skala Indeks Demokrasi | 83.49 poin |
| 21 | Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan Bencana | 1 | Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | 2.611 orang |

Jumlah APBD Tahun 2016

: Rp67.168.141.786.232

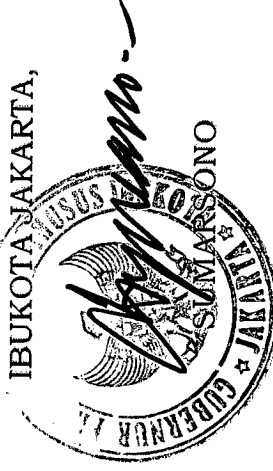
Jumlah Anggaran Belanja Tahun 2016

: Rp59.945.522.786.232

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016

: Rp34.382.577.360.479

4. Pjt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 586 TAHUN 2017
Tanggal 16 Maret 2017

INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

| NO | INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL | PROYEKSI 2016 |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,5-6,5 % |
| 2 | Tingkat Inflasi | 4,1% – 4,5% |
| 3 | PDRB Harga Berlaku | 1.768,00 Triliun Rupiah |
| 4 | PDRB Harga Konstan Tahun 2010 | 563,42 Triliun Rupiah |
| 5 | Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha | |
| | A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 0,09 |
| | B. Pertambangan dan Penggalan | 0,24 |
| | C. Industri Pengolahan | 13,84% |
| | D. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,29% |
| | E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,04% |
| | F. Konstruksi | 12,89% |
| | G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 16,69% |
| | H. Transportasi dan Pergudangan | 3,35% |
| | I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 5,24% |
| | J. Informasi dan Komunikasi | 7,18% |
| | K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 10,53% |
| | L. Real Estate | 6,12% |
| | M. Jasa Perusahaan | 7,29% |
| | N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 5,15% |
| | O. Jasa Pendidikan | 5,66% |

| NO | INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL | PROYEKSI 2016 |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,68% |
| | Q. Jasa Lainnya | 3,72% |
| 6. | Struktur Ekonomi Menurut Pengeluaran | |
| | a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 58,40% |
| | b. Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 1,81% |
| | c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 9,35% |
| | d. Pembentukan Modal Tetap Bruto | 39,92% |
| | e. Perubahan Inventori | 0,70% |
| | f. Ekspor Barang dan Jasa | 15,36% |
| | g. Dikurangi Impor Barang dan Jasa | 43,23% |
| | h. Net Ekspor Antar Daerah | 17,68% |
| 7. | PDRB per Kapita | 151,20 Juta Rupiah |
| 8. | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | 2,09% |
| 9. | Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB | 2,51% |
| 10. | Rasio Dana Perimbangan terhadap PDRB | 0,88% |
| 11. | APBD | Rp67.168.141.786.232 |
| 12. | ICOR | 8,87 |
| 13. | Kemampuan Investasi Pemprov DKI Jakarta | 11,9 triliun |
| 14. | Peranan Investasi Pemprov DKI Jakarta Terhadap Investasi Total | 1,45% |
| 15. | Ekspor | |
| | a. Melalui Pelabuhan Muat DKI Jakarta | 46.390.850.590 USD |
| | b. Produk asal DKI Jakarta | 11.538.106.633 USD |
| 16. | Impor melalui pelabuhan Muat DKI Jakarta | 71.132.687.000 USD |
| 17. | Jumlah Wisman | 2.377.266 orang |
| 18. | Jumlah Penduduk | 10.177.924 orang |
| 19. | Kepadatan Penduduk | 15.366,87 penduduk/km ² |
| 20. | Angka Kelahiran Total (TFR) | 2,1% |
| 21. | Jumlah Angkatan Kerja | 5.092.219 orang |
| 22. | Jumlah Penduduk Bekerja | 4.724.029 orang |

| NO | INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL | PROYEKSI 2016 |
|-----|-------------------------------------------|---------------|
| 23. | Tingkat Pengangguran Terbuka | 7,23% |
| 24. | Jumlah Penduduk Miskin | 368.670 orang |
| 25. | Persentase Jumlah Penduduk Miskin | 3,61% |
| 26. | Indeks Pembangunan Manusia | 78,9% |
| 27. | Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK | |
| | - SD/MI | 105,26% |
| | - SMP/MTs | 88,35% |
| | - SMA/MA/SMK | 76,35% |

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Sumarsono

SUMARSONO